

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat (30) disebutkan bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian Renja OPD

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana.

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan Keluarga Berencana yang berkesinambungan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun oleh masyarakat termasuk swasta. Pembangunan Keluarga Berencana lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas masyarakat yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2017. Mewujudkan hal tersebut bukanlah mudah karena Keluarga Berencana juga memiliki masalah utama yang dihadapi yakni Tingginya Angka Kelahiran, Rendahnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, tingginya harga alat kontrasepsi serta terbatasnya sumber pembiayaan Keluarga Berencana, juga belum optimalnya alokasi pembiayaan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur,

Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

16. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Tahun 2007 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
23. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
24. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.
25. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor .....Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.
26. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 800/...../Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini dijadikan serbagai Tolak Ukur untuk memberikan arahan dan sekaligus melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misi lima tahun kedepan serta menuntun seluruh penyelenggaraan kegiatan dalam setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja ini merupakan acuan dan pedoman dari seluruh jajaran penyelenggara Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Keluarga) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran sehingga dapat memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan pelayanan organisasi perangkat daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah :

- 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah :

Bab V : Penutup

Lampiran – lampiran/Pendukung

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2022, serta progres pencapaian kinerja dalam renstra periode 2016-2021 sehingga dapat diidentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan penyediaan anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dan rencana kinerja Tahun 2021 sehingga kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan masih melanjutkan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan melakukan penyempurnaan atas program dan kegiatan Tahun 2021 meskipun pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

Berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, Visi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu ***Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Mandiri, Pembangun, Berkualitas dan Sejahtera***”.

Sedangkan Misi yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan Alat Kontrasepsi (Alkon) kepada Pasangan Usia Subur yang produktif dan potensial
2. Melakukan perencanaan keluarga secara cermat
3. Melakukan peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi
4. Melakukan Pembinaan Keluarga (Bina Keluarga)
5. Melaksanakan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
6. Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai fungsi dan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan 4 (empat) urusan, 3 program dan 9 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) :**

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB.

**c. Program Pembedayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS):**

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN RI Nomor 163 Tahun 2016 dengan uraian tugas pokok dan fungsi.

❖ **Tugas**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan.

## ❖ Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- d) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- e) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- f) Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
- g) Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- h) Pelaksanaan pelayanan KB.
- i) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- k) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

### **2.2.1. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Tabel 1  
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Pegawai	L	P	JUMLAH
1	PNS	14	28	42
2	CPNS	-	-	-
3	Honor Daerah	-	1	1
4	Honor Provinsi (PLKB)	-	-	-
5	Out scorching	5	19	24
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>42</b>	<b>67</b>

Sumber Daya Asset/Modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Tempat Kerja	16 Unit	1 Kantor Dalduk dan KB, 14 Balai KB dan 1 Gudang Alkon
2	Kendaraan Roda 4	7 Unit	Mobil Kepala Dinas, Mobil Sekretaris Dinas, Mobil Akseptor, Mobil Pelyanan KB, Mobil Mopen dan Mobil Box
3	Kendaraan Roda 2	42 Unit	-
4	Meja	57 Buah	-
5	Kursi	100 Buah	-
6	Laptop	14 Unit	-
7	Personal Computer (PC)	24 Unit	-
8	Proyektor	7 Unit	-
9	Telephon Mobil (Smartphon)	14 Unit	Mengonlinekan Data

Daftar Nama KKBPK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL YG DIKUASAI
1	Elli Rosita Hasibuan, SH	K.KKBPK	Angkola Barat	14
2	Erlina Harahap	K.KKBPK	Angkola Timur	15
3	Dra. Deliana	KKPBK		
4	Ermina Wati	KKPBK		
5	Aswin Batubara	K.KKBPK	Angkola Selatan	17
6	Masbulan Daulay	KKPBK		
7	Saiful Alamsyah Hrp	K.KKBPK	Sipirok	40
8	Nurlela Sari, SP	KKPBK		
9	Raudah Simbolon	KKPBK		
10	Nisma Harahap	K.KKBPK	Batangtoru	23
11	Syahroma Husni, S.Sos	KKPBK		

12	Harliny Harahap,SKM	KKPBK		
13	Nurbayani	K.KKBPK	Marancar	12
14	Khalijah, S.Sos	K.KKBPK		
15	Rudi Priambono, S.Sos	K.KKBPK	Batang Angkola	36
16	Elvina Sari Siregar	KKPBK		
17	Rahmi Miatul Ummi	KKPBK		
18	Nurjamila Pulungan	K.KKBPK	Arse	10
19	Lina Rahmadani, Am.keb	K.KKBPK	Sayur Matinggi	19
20	Lenni Marlina	KKPBK		
21	Nurhaida	K.KKBPK	Angk. Sangkunur	10
22	Anugrah Dian Syaputra	K.KKBPK	Muara B. Toru	9
23	Rotua Natalia	K.KKBPK	Tantom Angkola	17
24	Leli Junida Siregar	K.KKBPK	SD Hole	26

### 2.2.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Pejabat Struktural Eselon II A) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dibantu oleh :

- ❖ Sekretaris Dinas
- ❖ Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- ❖ Kepala Bidang Keluarga Berencana
- ❖ Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- ❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ❖ Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- ❖ Kelompok Pejabat Fungsional

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 15 Ayat (4) bahwa Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan

Fungsional penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana menjadi pegawai negeri sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengalihkkkan Personil (Pengawas Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ke Pemerintah Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara sesuai Berita Acara Serah Terima Personil dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Nomor 800/4705/2017 dan Nomor 042/KP.02.02/B2/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang bertempat di Ruang Frankfurt, London dan Sanfransisco Hotel Adi Mulia Medan.

Selanjutnya tentang belanja pegawai PPLKB dan PLKB yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, serta hak-hak kepegawaian masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai tanggal tiga puluh satu Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (31-12-2017) dan mulai tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (1-01-2018), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Secara umum Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode 2011 – 2015 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara terinci pembagian kewenangan tersebut tertuang dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

1. Pengendalian Penduduk :
  - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk.
  - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2. Keluarga Berencana (KB) :

- a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
  - b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
  - c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
  - d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan
3. Keluarga Sejahtera :
- a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  - b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Standarisasi Pelayanan dan Sertifikasi.

#### 1.1. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Salah satu indikator keberhasilan program Bangga Kencana adalah penurunan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk, yang dalam hal ini dicerminkan dalam rata-rata jumlah laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari tabel dibawah diketahui bahwa rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung turun dari 0,91 pada tahun 2017 menjadi 0,67 pada tahun 2021.

Tabel : 2  
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk  
Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	Kedaaan Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk	305.276	310.274	311.492	312.924	315.021
		302.520	305.276	310.274	311.492	312.924
		0,91	1,61	0,39	0,45	0,67

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

Jumlah penduduk Tapanuli Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 312.924 jiwa pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mencapai 315.021 Jiwa. Peningkatan ini tentu saja

berasal dari pertumbuhan penduduk alami melalui kelahiran dan pertumbuhan penduduk melalui migrasi. Data rata-rata jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel : 3**  
**Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021
1	2	3	4	5
1	Batang Angkola	22.059	22.113	0,24
2	Sayur Matinggi	27.123	27.023	0,36
3	Angkola Timur	22.322	22.718	1,77
4	Angkola Selatan	33.643	33.658	0,04
5	Angkola Barat	26.122	26.267	0,55
6	Batang Toru	35.165	35.478	0,89
7	Marancar	10.645	10.718	0,68
8	Sipirok	34.833	35.136	0,86
9	Arse	8.878	8.970	1,03
10	Saipar Dolok Hole	14.589	14.745	1,06
11	Aek Bilah	7.572	7.618	0,60
12	Muara Batang Toru	16.776	17.036	1,54
13	Tano Tombangan Angkola	16.026	16.168	0,88
14	Angkola Sangkunur	23.085	23.181	0,41
15	Angkola Muaratais	14.086	14.192	0,75
Jumlah		312.924	315.021	0,67

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di Tapanuli Selatan sebesar 0,67 persen pada tahun 2021 dengan pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Angkola Timur dengan capaian pertumbuhan penduduk sebesar 1,77 persen.

#### 1.2. Peserta KB Aktif (MKJP)

Sedangkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2020 dan 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

**Tabel 2**  
**Jumlah MKJP Per Kecamatan Tahun 2020 s/d 2021**

No.	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
1	Batang Angkola	553	471
2	Sayur Matinggi	602	279
3	Angkola Timur	1.067	1.201
4	Angkola Selatan	1.344	1.223
5	Angkola Barat	1.128	758

6	Batang Toru	1.056	602
7	Marancar	423	684
8	Sipirok	1.305	1.222
9	Arse	837	1405
10	Saipar Dolok Hole	685	1.246
11	Aek Bilah	337	625
12	Muara Batang Toru	566	963
13	Tano Tombangan Angkola	779	393
14	Angkola Sangkunur	877	824
15	Angkola Muara Tais	389	712
Jumlah		10.689	12.608

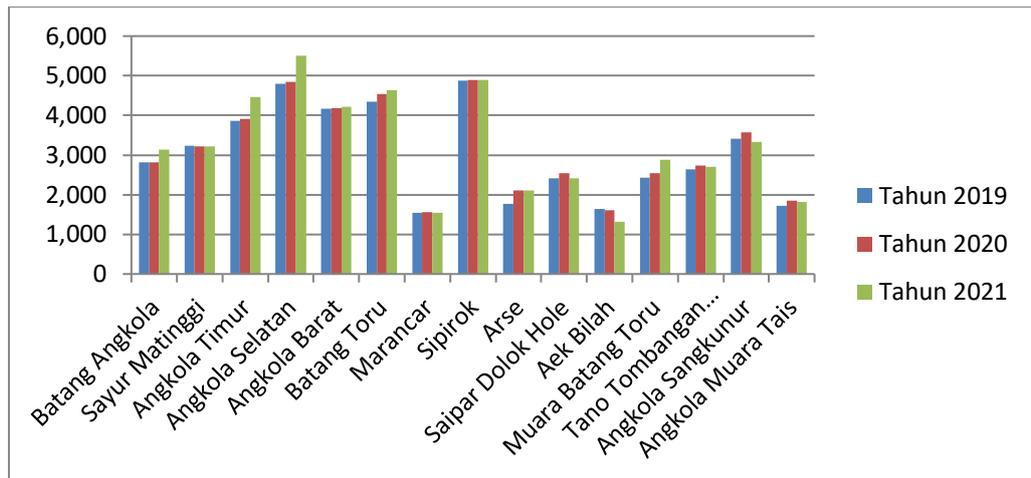
Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Adapun Pasangan Usia Subur (PUS) menurut kecamatan Tahun 2019, 2020 dan 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

No.	Kecamatan	Jumlah PUS		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5
1	Batang Angkola	2.812	2.812	3.131
2	Sayur Matinggi	3.230	3.224	3.224
3	Angkola Timur	3.865	3.908	4.462
4	Angkola Selatan	4.791	4.850	5.497
5	Angkola Barat	4.166	4.178	4.220
6	Batang Toru	4.344	4.542	4.636
7	Marancar	1.541	1.556	1.543
8	Sipirok	4.876	4.899	4.899
9	Arse	1.774	2.107	2.111
10	Saipar Dolok Hole	2.408	2.543	2.411
11	Aek Bilah	1.640	1.608	1.320
12	Muara Batang Toru	2.424	2.543	2.881
13	Tano Tombangan Angkola	2.641	2.732	2.707
14	Angkola Sangkunur	3.410	3.565	3.326
15	Angkola Muara Tais	1.727	1.853	1.823
Jumlah		43.416	45.649	48.191

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Grafik jumlah PUS Tahun 2020 s/d 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tapanuli Selatan :



Adapun jumlah Anak Umur 5 s/d 9 Tahun laki-laki dan perempuan menurut kecamatan pada Tahun 2021 :

Tabel 5  
Jumlah Anak Umur 5 s/d 9 Tahun laki-laki dan perempuan menurut kecamatan pada Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah umur 5 s/d 9 Tahun		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Angkola Barat	1.234	1.299	2.533
2	Batang Toru	1.108	1.194	2.302
3	Angkola Timur	1.234	1.236	2.470
4	Sipirok	1.359	1.311	2.661
5	Saipar Dolok Hole	1.108	1.130	2.238
6	Angkola Selatan	1.257	1.199	2.456
7	Batang Angkola	753	831	1.584
8	Arse	1.039	1.262	2.301
9	Muara Batang Toru	1.120	1.302	2.422
10	Marancar	1.137	1.153	2.290
11	Sayur Matinggi	1.145	1.189	2.334
12	Aek Bilah	1.103	1.064	2.167
13	Angkola Sangkunur	1.318	1.351	2.669
14	Tantom Angkola	1.046	1.163	2.209
15	Angkola Muara Tais	468	628	1.096
Jumlah		16.420	17.312	33.732

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Selanjutnya Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2020 s/d 2021 Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 6  
Rasio Akseptor Per Kecamatan Tahun 2020 s/d 2021

No.	Kecamatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jumlah Akseptor KB	Jlh Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB	Jumlah Akseptor KB	Jlh Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
1	Batang Angkola	1.620	2.812	57,61	2.510	3.131	80,16
2	Sayur Matinggi	2.225	3.224	69,01	2.225	3.224	69,01
3	Angkola Timur	2.835	3.908	72,54	3.498	4.462	78,39
4	Angkola Selatan	4.240	4.850	87,42	3.147	5.497	57,24
5	Angkola Barat	3.522	4.178	84,30	3.485	4.220	82,58
6	Batang Toru	3.215	4.542	70,78	3.396	4.636	73,25
7	Marancar	1.185	1.556	76,16	1.242	1.543	80,49
8	Sipiok	3.398	4.899	69,36	3.538	4.899	72,21
9	Arse	1.879	2.107	89,18	1.959	2.111	92,79
10	Saipar Dolok Hole	1.774	2.543	69,76	1.731	2.411	71,79
11	Aek Bilah	1.031	1.608	64,12	819	1.320	62,04
12	Muara Batang Toru	2.498	2.543	98,23	2.541	2.881	88,19
13	Tano Tombangan Angkola	2.520	2.732	92,24	2.453	2.707	90,61
14	Angkola Sangkunur	3.065	3.565	85,97	2.878	3.326	86,53
15	Angkola Muara Tais	1.225	1.853	66,11	1.229	1.823	67,41
	Jumlah	36.232	46.920	77,22	36.651	48.191	76,05

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 Akseptor KB berjumlah 28,204 meningkat menjadi 36.651 pada tahun 2021, demikian juga halnya dengan Rasio Akseptor KB menurun dari 66,28 pada tahun 2016 menjadi 76,05 pada tahun 2021. Sedangkan Rasio Akseptor KB menurut kecamatan pada tahun 2021, menunjukkan bahwa Kecamatan Arse memiliki Rasio Akseptor KB terbesar yakni 92,79 dan Kecamatan Angkola Selatan memiliki Rasio Akseptor KB terkecil yakni 57,24. Perkembangan Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 7  
Rasio Akseptor KB Tahun Tahun 2017 - 2021

No.	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Akseptor KB	31.082	32.589	34.827	36.232	36.651
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	43.262	43.581	45.649	46.920	48.191
3	Rasio Akseptor KB	71,84	74,78	76,29	77,22	76,05

Sumber : Badan KB, PP dan PA Kab.Tapsel

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli Selatan 71,84 pada tahun 2017 menjadi 74,78 pada tahun 2018, kemudian menjadi 76,29 pada tahun 2019 dan menjadi 77,22 pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 Rasio akseptor KB menjadi 76,05.

Sedangkan Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 8  
Jumlah Angka Kelahiran Total (TFR)  
Per WUS (15 – 49 Tahun) TAHUN 2021

No	Kelompok Umur	ASFR / Jumlah Umur
1.	15 – 19	37
2.	20 – 24	127
3.	25 – 29	141
4.	30 – 34	112
5.	35 – 39	69
6.	40 – 44	28
7.	45 – 49	17
<b>JUMLAH</b>		<b>531</b>

Dengan Rumus :

$$TFR = \frac{\text{Jumlah Umur}}{1000} \times 5$$

$$TFR = \frac{531}{1000} \times 5 = 2,65$$

Selanjutnya kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) telah dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebanyak 5 sekolah yaitu PIK-R Ridho di SMP Negeri 3 Sipirok, PIK-R Martondi di SMP Negeri 4 Sipirok, PIK-R Rizki di SMP Negeri 5 Sipirok, PIK-R Saroha di SMP Negeri 6 Sipirok dan PIK-R Anggrek Putih di SMK Negeri 1 Angkola

Timur dan berupa sosialisasi kepada kelompok yaitu kelompok BKR Mawar desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar, BKR Sahata desa Pardomuan Kecamatan Muara Batang Toru, BKR Mangga desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan, BKR Mawar desa Paran Padang Kecamatan Sipirok dan BKR Bunga Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru.

Kemudian juga melaksanakan sosialisasi kepada kelompok BKB Adelwes desa Paranpadang Kecamatan Sipirok, BKB Melati desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar, BKB Pardamean Kecamatan Muara Batang Toru, BKB Bunga Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru dan BKB Anggrek desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi.

Selanjutnya melaksanakan juga sosialisasi sekaligus praktek kepada kelompok UPPKS Saroha desa Pardomuan Kecamatan Muara Batang Toru, UPPKS Martunas desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar, UPPKS Mawar desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat, UPPKS Mangga desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru dan UPPKS Mawar desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.

Adapun Daftar Kelompok Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut Kecamatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 9  
Kelompok Ketahanan Keluarga Per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	JUMLAH POKTAN				
		BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKS
1	Batang Angkola	21	21	2	2	5
2	Sayur Matinggi	11	4	4	1	4
3	Angkola Timur	8	11	11	3	4
4	Angkola Selatan	10	7	1	3	4
5	Angkola Barat	5	5	4	1	4
6	Batang Toru	5	3	2	1	3
7	Marancar	5	5	5	3	4
8	Sipirok	5	1	1	1	5
9	Arse	3	1	1	1	4
10	Saipar Dolok Hole	2	2	1	1	1
11	Aek Bilah	3	1	1	1	1
12	Muara Batang Toru	6	4	5	1	3
13	Tano Tombangan Angkola	9	7	3	1	3
14	Angkola Sangkunur	5	7	5	1	3
15	Angkola Muaratais	13	13	1	12	4
Jumlah		111	92	47	33	52

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

**TABEL 10**  
**PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021**

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1.	Meningkatkan pelayanan Alat Kontrasepsi (Alkon) kepada Pasangan Usia Subur yang produktif dan potensial	1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)	2,02	2,40
2	Melakukan perencanaan keluarga secara cermat	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,26	2,65
3	Melakukan peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	61,50	76,05
4	Melakukan Pembinaan Keluarga (Bina Keluarga)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,90	13,15
5	Melaksanakan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	24,30	26,16
6	Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (%)	24,00	31,48

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan fungsi kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

1. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan.
2. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi.
3. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi.
4. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang cenderung menurun.
5. Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar.
6. Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB.

7. Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap program KKBPK.
8. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga.
9. Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK.
10. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan.
11. Peran tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal
12. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi.
13. Masih banyaknya perkawinan usia muda
14. Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
15. Tingginya prilaku seks pra nikah di sebahagian kalangan remaja
16. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.
17. Masih tingginya jumlah keluarga miskin.
18. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan koseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
19. Pelaksanaan program dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-Kb.
20. Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

Dari beberapa isu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dijabarkan diatas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi, advokasi dan KIE program KKBPK.
2. Peningkatan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus (daerah tertinggal/perbatasan).
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan KKBPK, serta
4. Pengelolaan program KKBPK di Kecamatan.

Selain itu potensi yang juga dapat dikembangkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan melalui program/kegiatan Direktif Presiden adalah "Kampung KB". Kampung KB merupakan salah satu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi

Program KKBP di lini lapangan serta dapat menjadi jembatan integrasi kegiatan antara BKKBN Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Penyelenggaraan pelayanan pada setiap bidang digambarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi dengan capaian 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian 100 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian 100%
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian 100%
5. Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan capaian 100%
6. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan dengan capaian 100%

2. Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan

1. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri dengan capaian 14 Kecamatan.
2. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dengan capaian 100%

3. Bidang Keluarga Berencana

1. Program Keluarga Berencana dengan capaian 100%
2. Program Pelayanan Kontrasepsi dengan capaian 100%

4. Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga

1. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dengan capaian 70%
2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD dengan capaian 70%

**2.4. Riview Rancangan Renja**

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

Catatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota ada penambahan dan pengurangan kegiatan yaitu :
  - a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu penambahan karena pemakaian ruangan di Lantai 2 Kantor PP dan KB.
  - b. Pelaksanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Kantor PP dan KB karena sudah 5 tahun tidak cat.
  
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) ada Penambahan sub kegiatan yaitu :
  - a. Penyediaan Pelaksanaan HARGANAS
  - b. Penyediaan Dana untuk Pembinaan Desa Binaan di setiap Kecamatan
  - c. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
  - d. Dukungan Opeasional Pelayanan KB Bergerak
  
3. Program Pemberdayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS) ada Penambahan kegiatan yaitu :
  - a. Kegiatan Kelompok BKB, BKR, BKR dan UPPKS dalam rangka percepatan penurunan stunting
  - b. Kegiatan Kelompok PIK-R dalam rangka percepatan penurunan stunting

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021, terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat sesuai dari hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan yang telah diakomodir lewat e-planning Kabupaten Tapanuli Selatan yang berbasis online dan sudah dibahas pada Musrenbang Kabupaten. Program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan (usulan dari kecamatan data terlampir). Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

2. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan.
3. Pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi.
4. Usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
5. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, dan
6. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsi OPD.

Tabel 12  
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Tantom Angkola	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Unit	Kursi Plastik

## **BAB. III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara terinci pembagian kewenangan tersebut ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

##### **3.1.1. Pengendalian Penduduk :**

- a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk.
- b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota

##### **3.1.2. Keluarga Berencana (KB) :**

- a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
- d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan

##### **3.1.3. Keluarga Sejahtera :**

- a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### **4. Standarisasi Pelayanan dan Sertifikasi.**

Menjelang berakhirnya era Milenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyelenggarakan konferensi bertajuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development). SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan Agenda Pembangunan Global Tahun 2030 yang telah menjadi komitmen dari semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Berbeda dengan MDGs, tujuan dari SDGs jauh lebih ambisius dan komprehensif. SDGs menyatukan prinsip kesejahteraan untuk umat manusia melalui prinsip no one left behind dengan didukung oleh semua pemangku kepentingan pembangunan. SDGs memadukan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan yang diperkuat oleh tata kelola yang baik. Belajar dari pengalaman MDGs, keberhasilan pencapaian SDGs di tahun 2030 memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Bagian dari perencanaan ini sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian dokumen perencanaan: Peta Jalan SDGs sampai dengan tahun 2030, Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk periode 2017-2019 dan periode selanjutnya. Semua dokumen perencanaan ini harus dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian SDGs termasuk aspek perencanaannya, diperlukan suatu analisis kesenjangan antara kondisi Baseline dengan target dari indikator-indikator SDGs di tingkat Nasional sampai dengan Daerah.

Adapun target dari indikator-indikator SDGs adalah sebagai berikut :

Dalam kebijakan nasional perencanaan program pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing, oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan terus menyesuaikan dan merespon setiap program dan kegiatan yang berspektif gender. Adapun program dan kegiatan yang berspektif gender adalah sebagai berikut :

Disisi lain yang tidak kalah pentingnya bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, program-program tersebut secara nyata telah berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan nasional dalam lima tahun terakhir. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberhasilan program-program sektoral yang dilaksanakan secara integratif dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, beranjak dari program tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan terus merencanakan program dan kegiatan yang dapat mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu melaksanakan pelatihan masak-memasak, merangkai bunga dan jahit menjahit terhadap ibu-ibu rumah tangga pedesaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan menuju keluarga yang sejahtera.

Adapun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **1. Tujuan**

Adapun Tujuan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **2. Sasaran**

Sedangkan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu terkendalikannya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
    - 1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
    - 1.3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
    - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    - 2.1. Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - 3.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - 3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - 5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):
  1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
    - 1.1. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
    - 1.2. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK

- 1.3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok).
2. Kegiatan Pendayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
  - 2.1. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota
  - 3.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - 3.2. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) :
  1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
    - 1.1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Oragtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
  2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - 2.1. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

**BAB. IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan Laporan Kegiatan pemerintahan dan Pembangunan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pencapaian Program dan Kegiatan Tugas – Tugas Pemerintahan Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sudah terlaksana sebesar 91,23 % dari DPA OPD.

Dengan selesainya Penyusunan Program Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat merupakan Pertanggung Jawaban dalam melaksanakan Tugas, Tanggung Jawab serta kewenangan yang diberikan kepada OPD Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Sipirok, 1 Nopember 2022**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**AHMAD IBRAHIM LUBIS,S.Sos.MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740205 199602 1 003**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. 7	
2.1. Evaluasai Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Darah.....	20
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal OPD.....	22
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	29
3.3. Program dan Kegiatan.....	30
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. 32	
BAB V    PENUTUP.....	33

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Hidayah-Nya Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh *globalisasi* saat ini maka dibutuhkan kemampuan organisasi untuk menentukan arah dari perjalanan aktivitas organisasi. Untuk itu harus dapat ditentukan *Visi* Organisasi sebagai suatu arah jangka panjang organisasi dengan rencana Strategik sebagai suatu penjabaran cara mewujudkan *Visi*-nya. Sebagaimana *Visi* Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan ini mengacu kepada hasil evaluasi Renja Tahun 2021.

Semoga Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi mitra kerja serta segenap yang membutuhkan.



**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN 2022**

**TABEL 5  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL TAHUN 2022**

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN		
KODE		PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	
2	14					10,223,439,795	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA				14,711,356,617		
2	14	01				4,511,673,795	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				5,680,237,117		
01	02	01	2.02			3,519,405,795	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tercakupnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,768,280,417		
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)	100 %	3,437,905,795	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)	100 %	3,672,096,617
			02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Peringatan HUT Tapsel (Kali)	2 Kali	53,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Peringatan HUT Tapsel (Kali)	2 Kali	53,200,000
			06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Renja/P.Renja, LAKIP, RTP, Renstra dan Laporan Keuangan (Dokumen)	6 Dok	21,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Renja/P.Renja, LAKIP, RTP, Renstra dan Laporan Keuangan (Dokumen)	6 Dok	29,058,600
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (Laporan)	2 Lap	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (Laporan)	2 Lap	13,925,200
2	14	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>12,300,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>130,336,000</b>
			02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (stel)	65 Stel	12,300,000	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (stel)	134 Stel	105,336,000
			11						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5 Orang	25,000,000
2	14	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>183,000,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>424,619,500</b>
			02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	15 Unit	57,750,000
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	12 Bln	3,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	12 Bln	4,109,900
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya ATK dan Makan Minum (bulan)	12 Bln	23,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya ATK dan Makan Minum (bulan)	12 Bln	104,757,600
			06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Terbitan)	10 Terbitan	8,000,000
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah (OH)	180 OH	157,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah (OH)	180 OH	250,002,000
2	14	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>796,968,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>1,214,450,200</b>
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jumlah Benda-Benda Pos (Lembar)	75 Lbr	600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jumlah Benda-Benda Pos (Lembar)	75 Lbr	2,000,000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12 Bln	41,554,160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12 Bln	32,773,960

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Honorarium Jasa Administrasi Perkantoran PPK, Pemeriksa Barang, Panitia Pejabat Pengadaan, Gaji THL, dll (%) dan Jasa Kebersihan Kantor	100 % 12 Bln	754,813,840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Honorarium Jasa Administrasi Perkantoran PPK, Pemeriksa Barang, Panitia Pejabat Pengadaan, Gaji THL, dll (%) dan Jasa Kebersihan Kantor	100 % 12 Bln	1,179,676,240	
2	14	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>142,551,000</b>	
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	7 Unit	81,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	7 Unit	93,034,700	
			09						Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	1 Unit	49,516,300	
2	14	03		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>5,711,766,000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>8,964,155,000</b>	
2	14	03	2.02						<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				<b>2,029,840,000</b>	
			03						Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Dinas Dalduk dan KB	Tersedia dan Terdistribuínya Sarana KIE Program KKBPK (Unit)	87 Unit	1,909,800,000	
			05						Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) (Kali)	2 Kali	100,000,000	
			06						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok) (Laporan)	1 Laporan	20,040,000	
2	14	03	2.02	<b>Pendayaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>				<b>5,673,231,000</b>	<b>Pendayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>				<b>6,836,157,000</b>	
			02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Opeasional Penyuluh KB serta Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya Penyuluhan KB (Orang)	25 Org	5,673,231,000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Opeasional Penyuluh KB serta Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya Penyuluhan KB (Orang)	25 Org	6,836,157,000	
2	14	03	2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah</b>				<b>38,535,000</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah</b>				<b>98,158,000</b>	
			05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Site Efek (Orang)	1500 Org	8,535,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Site Efek (Orang)	1500 Org	30,000,000	
			11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Terlaksananya Operasional Pelayanan KB Bergerak (Orang)	1500 Org	30,000,000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Terlaksananya Operasional Pelayanan KB Bergerak (Orang)	1500 Org	68,158,000	
2	14	04		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>10,223,439,795</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Dinas Dalduk dan KB			<b>66,964,500</b>	
2	14	04	2.01						<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>33,268,500</b>	
			08						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Kelompok)	5 Klmpok	33,268,500	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	14	04	2.02							Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				33,696,000	
			02							Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Kelompok)	5 Klmpok	33,696,000	
<b>JUMLAH</b>									<b>10,223,439,795</b>				<b>JUMLAH</b>	<b>14,711,356,617</b>	